

BAB I

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Perda tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian serta reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp24.412.336.319,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.777.729.253,-**
 - Gaji dan Tunjangan : Rp. 5.689.217.923,-
 - Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 3.088.511.330,-

- b. Belanja Langsung : Rp. 15.634.607.066,-**

Terdiri dari : 6 Program dan 63 Kegiatan.

Program yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan pengelolaan Keuangan
6. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Jumlah dana yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 untuk masing-masing Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

**Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.079.542.466	2.040.081.460	98,59
1	Penyediaan jasa surat menyurat	43.100.000	42.313.450	98,18
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	389.935.000	378.156.376	96,98
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan, dan sopir kantor	590.160.940	569.246.363	96,46
4	Penyediaan alat tulis kantor	91.570.550	91.569.000	100,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	142.940.600	142.940.450	100,00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.904.776	9.903.500	99,99
7	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.750.000	2.750.000	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.960.000	23.947.825	99,95
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	721.320.600	716.859.496	99,38
10	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	11.000.000	11.000.000	100,00
11	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	19.100.000	17.600.000	92,15
12	Penyediaan makanan dan minuman	33.800.000	33.795.000	99,99
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	745.953.600	728.914.456	97,72
1	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	435.653.600	434.824.640	99,81
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000	78.600.000	98,25

3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	79.100.000	70.174.316	88,72
4	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15.000.000	14.850.000	99,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	44.100.000	43.900.000	99,55
6	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi/jaringan	34.000.000	33.439.000	98,35
7	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	7.300.000	7.260.000	99,45
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	50.800.000	45.866.500	90,29
III	Program peningkatan disiplin aparatur	65.250.000	62.220.950	95,36
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	65.250.000	62.220.950	95,36
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	342.886.600	317.575.366	92,62
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	342.886.600	317.575.366	92,62
V	Program peningkatan pengembangan sistem capaian sistem capaian kinerja pengelolaan keuangan	689.359.700	660.759.777	95,85
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	42.588.000	42.002.500	98,63
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	239.862.500	229.686.500	95,76
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	231.623.500	229.732.877	99,18
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	158.642.000	143.696.000	90,58
5	Pengelolaan Arsip SKPD	16.643.700	15.641.900	93,98
VI	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	11.711.614.700	10.267.599.862	87,67
1	Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II	25.380.150	25.235.150	99,43
2	Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS	93.010.800	91.503.684	98,38

3	Pengendalian administrasi alih status dan Pemindahan Pegawai ASN	164.321.300	161.054.940	98,01
4	Pemetaan Potensi Pegawai	1.774.033.200	1.747.325.148	98,49
5	Seleksi ASN untuk Pekan Olah Raga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN	1.778.568.000	1.756.580.010	98,76
6	Pendampingan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN	39.506.700	38.750.800	98,09
7	Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS	57.750.600	54.027.160	93,55
8	Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS	70.557.500	68.403.750	96,95
9	Pemutakhiran dan sinkronisasi data kepegawaian	36.700.000	35.489.950	96,70
10	Workshop Bimbingan Konseling PNS	436.543.450	428.587.800	98,18
11	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai	44.044.950	36.504.950	82,88
12	Rapat Koordinasi Kepegawaian	70.545.800	69.073.000	97,91
13	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	136.146.100	135.662.780	99,64
14	Implementasi tambahan penghasilan dengan SKP online	84.229.950	79.319.900	94,17
15	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	272.504.000	251.230.177	92,19
16	Pengelolaan administrasi status kepegawaian	55.937.300	54.575.850	97,57
17	Bimtek Jabatan Fungsional	112.796.000	106.851.350	94,73
18	Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian	300.602.850	297.911.000	99,10
19	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	56.948.300	55.152.500	96,85
20	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	195.067.900	190.404.000	97,61
21	Pengelolaan Tata Naskah PNS	90.494.200	89.018.850	98,37
22	Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur	443.959.600	428.940.468	96,62
23	Pengelolaan Mutasi Jabatan	1.243.327.800	1.199.207.250	96,45

24	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas	71.768.000	68.192.250	95,02
25	Indeks Profesionalitas ASN	46.676.850	44.416.300	95,16
26	Survey Kepuasan Masyarakat	48.938.700	48.604.100	99,32
27	Pengembangan Sistem Informasi ASN	70.834.950	67.822.950	95,75
28	Workshop Penguatan Kerjasama Tim	945.896.400	903.533.200	95,52
29	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja	130.817.000	126.722.700	96,87
30	Rekrutmen CPNS Prov. Sumbar	2.093.121.700	995.268.800	47,55
31	Peringatan HUT Korps Organisasi Profesi ASN	26.013.900	25.986.000	99,89
32	Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai	38.272.900	37.189.450	97,17
33	Rapat teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN	46.965.000	44.217.500	94,15
34	Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS	436.296.300	434.840.495	99,67
35	Penataan pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Barat	31.800.000	27.038.050	85,03
36	Sistem Informasi Pemetaan Pegawai	141.236.550	42.957.600	30,42
Jumlah		15.634.607.066	14.077.151.871	90,04

Adapun Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp2.079.542.466,- dan dapat direalisasi sebesar Rp2.040.081.460,- atau 98,59%.

Kelebihan dana pada program ini sebagian besar pada Penyediaan Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor dan Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur dalam rangka efisiensi anggaran.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi bidang kepegawaian. Kegiatan ini memfasilitasi mekanisme persuratan, mulai dari surat masuk hingga surat keluar.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp43.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp42.313.450,- atau capaian kinerja keuangan 98,18%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp389.935.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp378.156.376,- atau capaian kinerja keuangan 96,98%

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet untuk menunjang akses ke SIPKD dan SAPK dengan capaian kinerja 100%.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Sopir Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Sopir Kantor adalah dalam rangka penyediaan jasa petugas cs sebanyak 3 orang, tenaga pengamanan sebanyak 7 orang dan sopir sebanyak 3 orang.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Sopir Kantor sebesar Rp590.160.940,- dan dapat direalisasi sebesar Rp569.246.363,- atau capaian kinerja keuangan 96,46%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tenaga petugas cs sebanyak 3 orang, tenaga pengaman sebanyak 7 orang dan sopir sebanyak 3 orang pada kantor Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja 100%.

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini dilakukan untuk menunjang seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp91.570.550,- dan dapat direalisasi sebesar Rp91.569.000,- atau capaian kinerja keuangan 99%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan capaian kinerja 100%.

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp142.940.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp142.940.450,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya barang-barang cetakan seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya penggandaan untuk pelaksanaan kegiatan BKD yang akan menunjang pelayanan administrasi perkantoran, dengan capaian kinerja 100%.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah dalam rangka menunjang aktivitas perkantoran melalui penggantian komponen-komponen instalasi listrik. Alat-alat listrik tersebut

disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 9.904.776,- dan dapat direalisasi sebesar Rp9.903.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja 100%.

7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan adalah dalam rangka penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran oleh pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sebesar Rp2.750.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp2.750.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tabung pemadam kebakaran pada kantor Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja 100%.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah. Dengan bertambah wawasan aparatur, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan lebih baik.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp23.960.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp23.947.825,- atau capaian kinerja keuangan 99,95%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk langganan surat kabar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur, dengan capaian kinerja 100%.

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang didasarkan kepada surat perintah tugas dalam rangka menghadiri undangan rapat/workshop maupun koordinasi dan konsultasi dengan instansi dalam daerah maupun luar daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar Rp721.320.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp716.859.496,- atau capaian kinerja keuangan 99,38%.

Dari kegiatan ini tersedia dana untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah, sedangkan untuk capaian kinerja adalah sebesar 100%.

10. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebesar Rp.11.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp11.000.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

Realisasi dari kegiatan ini berdasarkan peliputan-peliputan bidang kepegawaian yang dilakukan media cetak/elektronik, dengan capaian kinerja 100%.

11. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp19.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp17.600.000,- atau capaian kinerja keuangan 92,15%.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan senam dan wirid untuk PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 100%.

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah dalam rangka menunjang seluruh kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Penyediaan makanan dan minuman disediakan terhadap pelaksanaan rapat-rapat rutin ataupun rapat koordinasi dengan tamu.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp33.800.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp33.795.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat-rapat rutin kantor dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian, dengan capaian kinerja 100%.

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp745.953.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp728.914.456,- atau capaian keuangan sebesar 97,72%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pada BKD, dengan capaian fisik 100%.

1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp435.653.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp434.824.640,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,81%. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi dilaksanakan melalui e-katalog.

Dari kegiatan ini diperoleh 10 unit PC, 3 unit laptop, 7 unit printer, dan 3 unit scanner yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 80.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 78.600.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,25%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp79.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp70.174.316,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,72%, realisasi keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan kebutuhan selama tahun berjalan.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (4 unit mobil dan 2 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur sebesar Rp15.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp14.850.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,00%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan Meubeleur selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp44.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp43.900.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,55%.

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sehingga mewujudkan kinerja yang baik, dengan capaian Kinerja 100%.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan sebesar Rp34.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp33.439.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,35%.

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telepon dan air, dengan capaian Kinerja 100%.

7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp7.300.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp7.260.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,45%.

Dari kegiatan ini diperoleh pengadaan 60 meter spanduk, 20 meter bendera, dan 5 unit banner yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp50.800.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp45.866.500,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 90,29%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp65.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp62.220.950,- atau capaian keuangan sebesar 95,36%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya Disiplin Aparatur pada BKD, dengan capaian fisik 100%.

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar Rp65.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp62.220.950,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 95,36%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 87 orang, dengan capaian kinerja 100%.

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp342.886.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp317.575.366,- atau capaian keuangan sebesar 92,62%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada BKD, dengan capaian fisik 100%.

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp342.886.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp317.575.366,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,62%.

Kegiatan ini telah melakukan pengiriman PNS pada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Bintek Kepegawaian ke BKN, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya, dengan capaian kinerja 100%.

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja pengelola keuangan sebesar Rp689.359.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp660.759.777,- atau capaian keuangan sebesar 95,85%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaporan capaian kinerja pada BKD, dengan capaian fisik 100%.

1. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD adalah berupa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA, DPA dan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD sebesar Rp42.588.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp4.002.500,- atau dengan capaian Kinerja keuangan adalah sebesar 98,63%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian Kinerja 100%.

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa penatausahaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp239.862.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp229.686.500,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 95,76%.

Dana kegiatan ini digunakan untuk honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (PA, KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara).

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan keuangan akhir tahun, semester dan bulanan yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah berupa penyusunan laporan capaian kinerja bulanan dan triwulan, penyusunan Penetapan Kinerja (PK), penyusunan bahan LKPJ Gubernur, LPPD dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan capaian kinerja lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp231.623.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp229.732.877,- atau dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 99,18%.

Hasil dari kegiatan ini tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

4. Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian aset SKPD

Kegiatan Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa monitoring aset SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian SKPD sebesar Rp158.642.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp143.696.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 90,58%.

Dana kegiatan ini digunakan untuk honorarium pengelolaan dan pengawasan asset BKD.

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pengelolaan aset Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan asset akhir tahun, semester dan bulanan yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

5. Pengelolaan Arsip SKPD

Kegiatan pengelolaan arsip SKPD adalah kegiatan yang disediakan berupa pengelolaan arsip SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip SKPD sebesar Rp16.643.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp15.641.900,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 93,98%.

Dana kegiatan ini digunakan untuk pengelolaan arsip BKD dan hasil dari kegiatan ini terwujudnya pengelolaan arsip kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan capaian Kinerja 100%.

VI. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR

1. Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.1 (Gol. Ruang II/d) dan Penata Tk.1 (Gol. Ruang III/d) untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus lulus Ujian Dinas.

Ujian Dinas dibagi dalam 2 tingkat yaitu:

1. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.I (Gol. Ruang II/d) menjadi Penata Muda (Gol Ruang III/a).
2. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.I (Gol. Ruang III/d) menjadi Pembina (Gol Ruang IV/a).

Tahun 2019 dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sebesar Rp25.380.150,- dan dapat direalisasi sebesar Rp25.235.150,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,43%.

Pada tahun 2019 ini, jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Ujian Dinas Tk.1 sebanyak 19 orang dan lulus 17 orang sedangkan yang mengikuti Ujian Dinas Tk.II sebanyak 23 orang dan lulus 21 orang, jadi dari 42 PNS yang ditargetkan lulus Ujian Dinas adalah 38 orang dengan tingkat capaian kinerja 100%.

2. Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS

Kegiatan Pengelolaan jabatan fungsional PNS kepegawaian bertujuan untuk mengelola jabatan fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 93.010.800,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 91.503.684,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98.38%.

Pada Tahun 2019 SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan sejumlah 1.280 SK dan 7 SK Pejabat Fungsional Jenjang Utama dengan tingkat capaian kinerja 100%.

3. Pengendalian Administrasi Alih Status dan Pemindahan Pegawai ASN

Kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi pindah dan penempatan PNS yaitu:

1. Pindah antar kabupaten/kota
2. Pindah dari provinsi ke kabupaten/kota
3. Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi
4. Pindah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat
5. Pndah dari kabupaten/kota ke provinsi lain

6. Pindah dari provinsi lain ke kabupaten/kota
7. Pindah dari Provinsi Sumatera Barat ke provinsi lain
8. Pindah dari provinsi lain ke Provinsi Sumatera Barat
9. Cuti besar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Administrasi Alih Status dan Pemindahan Pegawai ASN sebesar Rp164.321.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp161.054.940,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,01%.

Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang dipindahkan dan ditempatkan direncanakan sebanyak 600 SK Pindah dapat direalisasi sebanyak 749 orang, Target Lolos Butuh Sebanyak 224 SK dari target sebanyak 150 SK rekomendasi pindah/lolos butuh dengan tingkat capaian kinerja, dan SK Cuti sebanyak 237 SK dari target 300 SK dengan persentase fisik sebesar 117,72%.

4. Pemetaan Potensi Pegawai

Kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi Pegawai Negeri Sipil sehingga penempatan Pegawai Negeri Sipil pada satu bidang tugas sesuai dengan kompetensinya sehingga pencapaian target yang ditetapkan akan maksimal.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai adalah sebesar Rp1.774.033.200,- dan dapat direalisasi sebesar Rp1.747.325.148,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,49%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai potensi pegawai melalui pemetaan potensi dengan target untuk 3000 orang dan realisasi 3000 orang, maka capaian kinerja adalah 100%.

5. Seleksi ASN untuk Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN

Kegiatan Seleksi ASN untuk Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyeleksi dan mengirimkan atlet untuk mengikut PORNAS KORPRI di Bangka Belitung. Jumlah atlet yang dikirim sebanyak 89 orang atlet dengan cabang yang diikuti sebanyak 8 cabang olahraga.

Dana yang tersedia untuk Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN sebesar Rp1.778.568.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp1.756.580.010,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,76%.

6. Pendampingan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

Kebutuhan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kader Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggara pemerintahan di masa yang akan datang. Penerimaan Calon Praja IPDN harus dilaksanakan secara objektif, terbuka dan transparan, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan atau daerah. Dalam upaya mendapatkan Sumber Daya Manusia Calon Praja IPDN yang berkualitas, maka dilakukan beberapa tahap seleksi yang diawali dengan pendaftaran secara online di seluruh Indonesia dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Seleksi administrasi melalui sistem *online*;
- ✓ Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem CAT dilaksanakan di Provinsi;
- ✓ Seleksi kesehatan (dilaksanakan di Provinsi);
- ✓ Seleksi kesamaptaan (dilaksanakan di Provinsi);
- ✓ Tes psikologi dan tes integritas dan kejujuran (dilaksanakan di Provinsi);
- ✓ Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir) dilaksanakan di IPDN Jatinangor Jawa Barat.

Seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN menggunakan sistem GUGUR, yaitu peserta seleksi dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya. Semua hasil per tahap tes diumumkan secara online oleh Panitia Pusat dengan website www.ipdn.ac.id.

Dari 2.844 orang pelamar yang berhasil lulus sampai tahap Pantukhir sejumlah 60 orang.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp39.506.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp38.750.800,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,09%.

7. Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

Kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp57.750.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp54.027.160- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,55%.

Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tahun 2019 sebanyak 80 orang dan dinyatakan lulus seleksi sebanyak 66 orang, dan artinya hanya 66 orang tersebut yang memenuhi persyaratan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari Penilaian Kinerja PNS adalah dalam rangka peningkatan kinerja PNS, peningkatan efektivitas capaian target kinerja dan pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara maksimal serta peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penilaian kinerja ini mengadopsi metode penilaian 360 derajat, dimana seorang PNS dinilai oleh beberapa penilai yang terdiri dari atasan langsung, teman selevel dan bawahannya dengan menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup (alternatif jawaban telah disediakan).

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PNS sebesar Rp70.557.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp68.403.750,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,95%.

Hasil dari kegiatan ini tersedianya laporan penilaian kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target 320 orang, realisasinya 360 orang, maka capaian kinerja adalah 112,5%.

9. Pemutakhiran dan sinkronisasi Data Kepegawaian

Kegiatan Pemutakhiran dan sinkronisasi data kepegawaian bertujuan untuk mensinkronisasikan data kepegawaian antara data yang ada di OPD dengan data yang ada pada SIMPEG dan SAPK BKN.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepegawaian sebesar Rp36.700.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp35.489.950,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,70%.

10. Workshop Bimbingan Konseling PNS

Kegiatan Bimbingan Konseling PNS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat administrator dalam membimbing bawahan yang berkinerja rendah atau bermasalah. Peserta workshop ini adalah pejabat administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Workshop ini dilaksanakan dalam 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang per angkatan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan workshop ini sebesar Rp436.543.450,- dan dapat direalisasi sebesar Rp428.587.800,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,18%.

11. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa untuk memilih orang yang baik dan ditempatkan pada atau melaksanakan pekerjaan yang tepat, harus disusun formasi pegawai dengan melakukan kegiatan perhitungan kebutuhan pegawai yang berdasarkan pada "Analisis Jabatan dan Beban Kerja" yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran harus menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi.

Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai adalah untuk menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi serta melakukan penyempurnaan perhitungan kebutuhan pegawai

berdasarkan beban kerja dan data persediaan pegawai dalam rangka penyusunan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp44.044.950,- dan dapat direalisasi sebesar Rp36.504.950,- atau capaian keuangan sebesar 82,88%.

Kegiatan ini direncanakan untuk penempatan PNS sesuai dengan peta jabatan dan berperan dalam penyusunan formasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang akan menyediakan informasi kebutuhan pegawai yang akurat, dengan capaian kinerja 100%.

12. Rapat Koordinasi Kepegawaian

Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara Pengelola Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian sebesar Rp70.545.800,- dan dapat direalisasi sebesar Rp69.073.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,91%.

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Kota Sawahlunto dengan peserta Rakor ini adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian kabupaten/kota dan SKPD Provinsi sebanyak 120 orang.
- Dari Rakor ini diperoleh kesepakatan antara Provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian

Dari hasil diatas, maka capaian kinerja adalah sebesar 100%.

13. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp136.146.100,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp135.662.780,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 99,64%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil ini adalah penyampaian usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebanyak 850 usul Surat Keputusan terealisasi sebanyak Surat Keputusan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

14. Implementasi tambahan penghasilan dengan SKP online

Kegiatan Implementasi Tambahan Penghasilan Dengan SKP Online bertujuan untuk mengimplemetasikan tambahan penghasilan sesuai dengan SKP Online di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp84.229.950,- dan dapat direalisasi sebesar Rp79.319.900,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 94,17%.

15. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Pemilihan PNS berprestasi adalah dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan semangat kerja, pengabdian dan prestasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. Dengan memberikan penghargaan kepada PNS yang terpilih diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian serta dapat menjadi contoh bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk:

1. Menciptakan kompetisi yang sehat antara Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal.
2. Mendorong, memotivasi Pegawai Negeri Sipil meningkatkan aktivitas, kreativitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas.

Penilaian PNS berprestasi meliputi tes tertulis, wawancara dan peninjauan lapangan, dengan faktor-faktor yang dijadikan objek penilaian :

- a. Capaian rencana kerja dan realisasi
- b. Disiplin
- c. Tingkat pengabdian
- d. Kesesuaian lapangan prestasi kerja dengan kenyataan lapangan

- e. Kejujuran
- f. Kemampuan teknis
- g. Kerjasama
- h. Tertib administrasi

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi sebesar Rp272.504.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 251.230.177,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,19%.

Dari kegiatan ini, telah dilakukan pemberian penghargaan untuk PNS berprestasi sebanyak 8 orang, dengan capaian kinerja 100%.

16. Pengelolaan Administrasi Status Kepegawaian

Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer merupakan salah satu bentuk pengaplikasian pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp55.937.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp54.575.850,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 97,57%.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya SK CPNS dan Tenaga Honorer Provinsi Sumatera Barat dengan target 907 SK, realisasi SK CPNS 826 SK dan tenaga honorer 78 SK dan SK STTD sebanyak 4 SK dengan demikian capaian kerjanya adalah 100,11%.

17. Bimtek Jabatan Fungsional

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan bimtek jabatan fungsional kepegawaian sebesar Rp112.796.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp106.851.350,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 94,73%.

18. Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian

Kegiatan Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian bertujuan untuk menambah kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peserta dari Bimtek ini adalah pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bimtek ini dilaksanakan dalam 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang per angkatan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp300.602.850,- dan dapat direalisasi sebesar Rp297.911.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,10%.

19. Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada PNS atas jasanya yang bertujuan sebagai pendorong/memotivasi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan selama 10 tahun (berwarna perunggu), 20 tahun (berwarna perak) dan 30 tahun (berwarna emas) Jumlah PNS yang telah mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada 2019 sebanyak 1047 orang (target 500 orang), capaian kinerja sebesar 209,4%.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebesar Rp56.948.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp55.152.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,85%.

20. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tetap ada dan butuh proses untuk penanganannya sesuai aturan yang berlaku.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp195.067.900,- dan dapat direalisasi sebesar Rp190.404.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 97,61%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 6 kali sidang MPP yang telah dilaksanakan dihasilkan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 32 orang (ringan 20 orang, sedang 5 orang, berat 7 orang), izin perceraian 78 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

21. Pengelolaan Tata Naskah PNS.

Kegiatan Penataan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kelancaran dan efektivitas kegiatan administrasi perkantoran dalam suatu organisasi pemerintah baik secara elektronik maupun secara non elektronik.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penataan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian daerah adalah terwujudnya tata naskah kepegawaian yang teratur, rapi dan tertib juga terlaksananya up dating data base kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Base Kepegawaian Daerah sebesar Rp90.494.200,- dan dapat direalisasi sebesar Rp89.018.850,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,37%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terkelolanya tata naskah Kepegawaian sebanyak 22.800 file (target 22800 file, dengan capaian kinerja 100%) PNS di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

22. Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur

Kegiatan Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur bertujuan untuk meningkatkan potensi diri bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peserta workshop ini adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Workshop ini dilaksanakan dalam 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang per angkatan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp443.959.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp428.940.468,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,62%.

23. Pengelolaan Mutasi Jabatan

Dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier serta peningkatan mutu kepemimpinan dan jabatan struktural, maka untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural maka perlu dilakukan penilaian oleh suatu tim yaitu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan guna memberikan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.

Untuk tercapainya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat pejabat struktural, serta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu pejabat Pembina kepegawaian dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pada Tahun 2019, jumlah pengangkatan pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebanyak 16 orang dari target 14 orang pejabat dan untuk Jabatan Administrator dan Pengawas berjumlah 431 Pejabat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan sebesar Rp1.243.327.800,- dan dapat direalisasi sebesar Rp1.199.207.250,- atau 96,45%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengisian jabatan sesuai kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

24. Pembekalan PNS Purna Tugas

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang akan purna tugas di bidang kewirausahaan.
2. Menumbuhkan semangat berwiraswasta dan rasa percaya diri bagi PNS purna tugas sehingga mereka tetap merasa mampu dan produktif setelah memasuki masa pensiun.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembekalan PNS Purna Tugas adalah sebesar Rp71.768.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 68.192.250,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,02%.

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS yang akan memasuki purna tugas sebanyak 25 orang, dengan capaian kinerja 100%.

25. Indeks profesionalitas ASN

Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN bertujuan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran IP-ASN ini menggunakan 4 (empat) indikator yakni Tingkat Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin PNS.

Pada Tahun 2019 Pengukuran IP-ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil sampel sebanyak 6170 pegawai dengan hasil pengukuran 76,69% atau dalam tingkat profesionalitas sedang.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penanganan kasus-kasus kepegawaian sebesar Rp46.676.850,- dan dapat direalisasi sebesar Rp44.416.300,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,16%.

26. Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk meneliti sejauh mana tingkat kepuasan penerima layanan BKD atas pelayanan yang diberikan. Kegiatan ini bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan survey dan dari dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Rp48.938.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp48.604.100,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,32%.

27. Pengembangan Sistem Informasi ASN

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi ASN bertujuan untuk terwujudnya data dan profil PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk pengelolaan SDM aparatur dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

Kegiatan ini meliputi:

1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian SKPD
2. Sosialisasi penggunaan sistem informasi pelayanan kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Pembuatan laporan tahunan kegiatan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sistem Informasi ASN sebesar Rp70.834.950,- dan dapat direalisasi sebesar Rp67.822.950,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,75% dengan tingkat capaian kinerja 100%.

28. Workshop Penguatan Kerjasama Tim

Kegiatan Workshop Penguatan Kerjasama Tim bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PNS dalam melaksanakan pekerjaan dalam tim. Target dari kegiatan ini adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peserta workshop ini adalah pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Workshop ini dilaksanakan dalam 4 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang per angkatan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp945.896.400,- dan dapat direalisasi sebesar Rp903.533.200,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 93,65%.

29. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PNS pada unit dan organisasi dan sebagai pedoman bagi setiap PNS, pejabat penilai dan pejabat lain yang berkepentingan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja untuk kemajuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebesar Rp130.817.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp126.722.700,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,87%.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja di lingkungan Pemprov Sumbar dengan tingkat capaian kinerja 100%.

30. Rekrutmen CPNS Provinsi Sumbar

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rekrutmen CPNS Provinsi Sumbar sebesar Rp2.093.121.700,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp995.268.800,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 47,55%.

Rekrutmen CPNS Formasi Tahun 2019 dijadwalkan oleh KemenPAN-RB pada Tahun 2019 dengan tahapan: Pengumuman, Pendaftaran, Pengumuman Hasil Seleksi Adm, Masa Sanggah, Pengumuman Jadwal SKD, Pelaksanaan SKD, Pengumuman Hasil SKD, Pelaksanaan SKB, Integrasi Nilai SKD dan SKB, Penetapan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS. Namun, penetapan jadwal sesuai Surat Kemenpan-RB Nomor B/1007/S.SM.01. 00/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi 2019, yakni Rekrutmen CPNS Formasi Tahun 2019 dilaksanakan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Yang mana pada Tahun 2019 dilaksanakan untuk tahapan pengumuman hingga seleksi administrasi, sedangkan untuk Tahun 2020 dilaksanakan tahapan SKD hingga Penetapan NIP (Pengangkatan sebagai CPNS).

31. Peringatan HUT Korps organisasi profesi ASN

Kegiatan Peringatan HUT Korps ASN bertujuan untuk memeriahkan HUT Korpri. Kegiatan ini berupa pelaksanaan upacara HUT Korpri. Dari dana sebesar Rp26.013.900,- dapat direalisasikan sebesar Rp25.986.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,89%.

32. Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai

Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai antara lain Karis, Karsu, KPE dan kartu identitas pegawai lainnya. Pengelolaan KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik, dimana salah satu tujuan dari KPE adalah meningkatkan pelayanan kepada PNS. Kegiatan pengembangan KPE ini telah dirintis sejak tahun 2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan PT. SUCOFINDO (Persero) tentang Pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE dalam sistim layanan PNS.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp38.272.900,- dan dapat direalisasi sebesar Rp37.189.450,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,17%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembuatan kartu identitas pegawai sebanyak 646 PNS (dari target 400 PNS) yaitu berupa Karpeg

130 PNS, Karis 175 PNS, Karsu 341 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 161,5%.

33. Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN

Kegiatan Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN bertujuan menyatukan persepsi atau menyelesaikan permasalahan dalam organisasi KORPRI di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp46.965.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp44.217.500,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,67%.

34. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dilakukan secara terpadu dengan BKN Kanreg XII Pekanbaru. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat terpadu bertempat di Kota Bukittinggi dan dilakukan 2 periode (Periode April dan Oktober).

Jumlah SK yang dikeluarkan pada Periode April sebanyak 3.458 SK dari target 3.000 SK dan pada Periode Oktober sebanyak 3.362 SK dengan tingkat realisasi 113,63%

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp436.296.300,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp434.840.495,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 99,67%.

35. Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan penataan pegawai sesuai dengan Peta Jabatan yang telah disusun dan ditetapkan. Penataan ini bertujuan untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penanganan kasus-kasus kepegawaian sebesar Rp31.800.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp27.038.050,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 85,03%.

36. Sistem Informasi Pemetaan Pegawai

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Pemetaan Pegawai sebesar Rp141.236.550,- dan dapat direalisasikan

sebanyak Rp42.957.600,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 30,42%.

Rendahnya serapan anggaran kegiatan ini dikarenakan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dimana dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa pengelolaan infrastruktur Sistem Informasi Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi sehingga OPD tidak mempunyai kewenangan dalam membuat dan mengembangkan infrastruktur Sistem Informasi.

B. OUTCOME PROGRAM

Dengan dilaksanakannya Program/Kegiatan yang mendukung urusan pengelolaan kepegawaian, pada Tahun 2019 didapat hasil setelah pelaksanaan Program/Kegiatan diantaranya:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) pada Provinsi Sumatera Barat sebesar 76,69% atau dalam tingkat sedang. Pengukuran IP-ASN yang dihitung berdasarkan tingkat Kualifikasi PNS, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin PNS.
2. Terlaksananya proses Manajemen PNS dengan baik yang terdiri dari perencanaan kebutuhan PNS, rekrutmen CPNS, Pemetaan PNS, Penempatan PNS dalam Jabatan, Mutasi dan promosi PNS, Pensiun PNS, Pengelolaan Tata Naskah PNS, Penegakan Disiplin PNS dan Kesejahteraan PNS.

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Sebagai tolak ukur pelaksanaan urusan kepegawaian di Provinsi Sumatera Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan indikator kinerja daerah. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan 2021 terdapat 2 (dua) indikator kinerja daerah untuk urusan kepegawaian yang ditetapkan guna memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan kepegawaian pada Tahun 2019. Adapun realisasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2019 dimaksud sebagaimana pada tabel dibawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2019		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Indeks Profesionalitas ASN	72,00%	76,69%	106,51%
2	Perangkat daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70%	92,00%	45,10%	49,02%

1. Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dimana pengukuran menggunakan indikator data (individu) pegawai, sebagai berikut, yaitu:

a. Kualifikasi

Mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formasi PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Data yang digunakan adalah data pendidikan formal dengan indikator pendidikan formal terakhir
Bobot penghitungan: 25 %

b. Kompetensi

Mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS
Data yang digunakan adalah data pengembangan kompetensi, dengan indikator riwayat pengembangan kompetensi (misal: diklat pim/struktural, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/ *workshop*)
Bobot penghitungan: 40%

c. Kinerja

Mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Data yang digunakan adalah data hasil penilaian kinerja, dengan indikator hasil penilaian kinerja (nilai sasaran kinerja pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)

Bobot penghitungan: 30 %

d. Disiplin

mengukur data/informasi kepegawaian yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan indikator, data/informasi hukuman disiplin (seperti: tidak pernah terkena hukuman disiplin, pernah terkena hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penghitungan: 5 %

Dari hasil penghitungan yang dilakukan secara manual dan mandiri kepada 6.170 pegawai ASN terhadap 4 (empat) indikator, didapat Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebesar:

NO	INDIKATOR PENGUKURAN	NILAI
1	Kualifikasi	14.90
2	Kompetensi	31.47
3	Kinerja	25.32
4	Disiplin	5
TOTAL		76.69

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui langkah-langkah:

- a. Pengukuran mandiri oleh setiap SKPD terhadap pegawai di lingkungan masing-masing OPD sesuai dengan formula dari BKN. Pengukuran pada masing-masing OPD dilakukan dengan entri data kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin PNS.
- b. Rekapitulasi pengukuran terhadap 6.170 pegawai ASN yang diukur oleh OPD diolah oleh Badan Kepegawaian Daerah menurut kategori masing-masing.
- c. Penginputan rekapitulasi hasil pengukuran mandiri Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kategori ke dalam aplikasi Pengukuran IP ASN BKN.

Berdasarkan hasil pengukuran manual yang telah dihitung dan diupload kedalam aplikasi pengukuran BKN terhadap **6.170** pegawai ASN dari total **20.244** orang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, didapat Total nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera adalah **76.69** Point dengan kategori **Sedang**.

Penggolongan kategori pengukuran Indeks Profesionalitas sebagai berikut:

- Point 91-100 kategori sangat tinggi
- Point 81-90 kategori tinggi
- Point 71-80 kategori sedang

- Point 61-70 kategori rendah
- Point ≤60 kategori sangat rendah

Berikut tabel realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Indeks Profesionalitas ASN	72	76.69	106.52%

Dari tabel dapat dilihat, indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ditargetkan skor 72 terealisasi **76.69** dengan tingkat capaian **106.52%** dengan kategori sedang. Jika dibandingkan dengan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2018 dengan skor sebesar 76 dan capaian 111.76% terjadi penurunan tingkat capaian sebesar 5.24%. Penurunan tingkat capaian kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dari tahun 2018 dikarenakan Tahun 2018 pengukuran dilakukan terhadap 3.330 aparatur yang terdiri dari 1.096 data struktural dan 2.234 staf. sedang pengukuran pada tahun 2019 dilakukan terhadap pejabat struktural sebanyak 1.038 orang, pejabat fungsional sebanyak 3.976, pelaksana sebanyak 1.156 orang dengan total 6.170 orang.

2. Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Formasi Minimal 70%

Formasi adalah jumlah susunan pangkat yang diperlukan dalam satu satuan organisasi untuk mampu melakukan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan formasi didasarkan pada analisa jabatan, bezzeting (persediaan pegawai saat ini) dan analisa beban kerja merupakan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu

Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai memiliki

pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM Aparatur kepegawaian diukur dengan indikator Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%. Berdasarkan data dan perhitungan terhadap 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 23 Perangkat Daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70% berdasarkan pada penempatan Jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ABK) dan sebanyak 28 Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan formasi minimal 70 % berdasarkan pada penempatan jabatan Fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yaitu Sekretariat Daerah, Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD, Inspektorat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bada Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Capil, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Satpol PP dan Damkar, RSUD Pariaman, RSUD Solok dan RS HB Saanin Padang. Dari 28 Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan formasi 70% disebabkan karena dilakukannya perubahan atas Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja baru disahkan pada Tanggal 5 November 2019 sehingga tidak cukup waktu untuk dilakukan penataan pegawai.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%	92,00%	45,10%	49,02%

Kedepan akan dilakukan penataan pegawai untuk mengatasi kesesuai formasi dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola urusan kepegawaian terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh Badan Kepegawaian Daerah, yakni:

1. Masih belum optimalnya penataan pegawai sesuai dengan peta jabatan.

Permasalahan ini muncul dikarenakan Keputusan Gubernur tentang peta jabatan pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 sehingga penataan pegawai sesuai dengan peta jabatan yang baru sulit untuk dilaksanakan. Kedepannya penataan pegawai akan dilaksanakan dengan lebih baik lagi karena menyangkut dengan pengusulan formasi PNS ke Kemenpan-RB.

2. Masih belum optimalnya pemanfaatan SIMPEG dalam pengambilan keputusan kepegawaian.

Fitur-fitur yang ada dalam Simpeg BKD belum sepenuhnya dapat mengakomodir kemudahan dalam proses manajemen PNS. Kedepannya, penambahan modul kepegawaian dilakukan secara bertahap dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Kominfo sebagai pihak yang mengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

3. Masih belum mencukupinya anggaran dalam peningkatan kapasitas aparatur.

Dikarenakan terbatasnya APBD Provinsi Sumatera Barat sehingga anggaran lebih dititikberatkan untuk pembangunan fisik dan belanja modal. Kedepannya

anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

E. PENGHARGAAN NASIONAL YANG DITERIMA

Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat menerima BKN Award kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Tingkat Provinsi Tahun 2019.

Padang, 2 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ABDUL GAFAR, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196012251983031010